1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

   Pada bulan **Juli 2026**, Kota Banjarbaru mengalami inflasi dan deflasi.

   - Minggu I (M1): Kota Banjarbaru mengalami deflasi dengan IPH sebesar -0,09, dipengaruhi oleh komoditas Bawang Merah (-0,6773), Cabai Rawit (-0,2187), dan Cabai Merah (-0,139).
   - Minggu II (M2): Tidak dilakukan perhitungan IPH.
   - Minggu III (M3): IPH berbalik arah mengalami inflasi sebesar 0,16, dengan andil utama dari komoditas Daging Ayam Ras (0,9115), Beras (0,5383), dan Bawang Putih (0,1845).
   - Minggu IV (M4): IPH mengalami peningkatan menjadi 0,19, masih didorong oleh andil komoditas Daging Ayam Ras (1,165), Beras (0,5383), dan Bawang Putih (0,1608).
   - Minggu V (M5): Kota Banjarbaru kembali mengalami deflasi di akhir bulan dengan IPH sebesar -0,02, dipengaruhi oleh komoditas Bawang Merah (-1,0157), Telur Ayam Ras (-0,3685), dan Cabai Rawit (-0,2187).

   Indeks Perkembangan Harga (IPH) di Kota Banjarbaru pada Juli 2026 menunjukkan dinamika harga yang fluktuatif, diawali dengan deflasi tipis sebesar -0,09 pada minggu pertama yang didorong oleh penurunan harga Bawang Merah, Cabai Rawit, dan Cabai Merah. Memasuki pertengahan bulan, tekanan harga berbalik arah menjadi inflasi hingga puncaknya sebesar 0,19 pada minggu keempat akibat tingginya andil komoditas Daging Ayam Ras, Beras, dan Bawang Putih. Namun, pergerakan inflasi ini berhasil diredam pada minggu kelima dengan berbalik mengalami deflasi sebesar -0,02 berkat penurunan harga Bawang Merah, Telur Ayam Ras, dan Cabai Rawit. Secara umum, dinamika ini menunjukkan perlunya kewaspadaan TPID terhadap komoditas unggas dan bumbu dapur untuk menjaga stabilitas harga pangan daerah.

   Pada bulan **Agustus 2026**, Kota Banjarbaru dominan mengalami deflasi sebagai berikut.

   - Minggu I (M1): IPH tercatat mengalami deflasi sebesar -0,78, dipengaruhi oleh komoditas Bawang Merah (-0,2483) dan Telur Ayam Ras (-0,1706), dengan Bawang Putih (0,2237) sebagai komoditas penahan/pembanding.
   - Minggu II (M2): Deflasi berada di level -0,56, dipengaruhi oleh komoditas Bawang Putih (-0,224), Bawang Merah (-0,216), dan Telur Ayam Ras (-0,171).
   - Minggu III (M3): Deflasi menipis menjadi -0,08, dipengaruhi oleh komoditas Telur Ayam Ras (-0,1706), Bawang Putih (-0,1272), dan Cabai Merah (-0,0472).
   - Minggu IV (M4): Tidak dilakukan perhitungan IPH

   Indeks Perkembangan Harga (IPH) di Kota Banjarbaru pada Agustus 2026 konsisten berada dalam tren deflasi sepanjang bulan. Tekanan deflasi tertinggi terjadi pada minggu pertama sebesar -0,78, kemudian berangsur landai hingga -0,08 pada minggu ketiga. Tren penurunan harga ini terutama didorong oleh melimpahnya pasokan dan penurunan harga komoditas Bawang Merah, Telur Ayam Ras, Bawang Putih, serta Cabai Merah. Meskipun tren deflasi mencerminkan pasokan yang terjaga dan keterjangkauan harga bagi masyarakat, pengawasan berkala tetap diperlukan oleh TPID untuk menjaga keseimbangan harga di tingkat produsen maupun konsumen.

Pada bulan **September 2026**, Kota Banjarbaru mengalami tren inflasi sebagai berikut.

- Minggu I (M1): IPH tercatat mengalami inflasi sebesar 0,46, dengan andil utama dari komoditas Daging Sapi (0,7968), Daging Ayam Ras (0,3068), dan Cabai Merah (0,0245).
- Minggu II (M2): Kota Banjarbaru berbalik arah mengalami deflasi dengan IPH sebesar -0,19, dipengaruhi oleh komoditas Bawang Merah (-0,4909), Cabai Merah (-0,157), dan Bawang Putih (-0,1513).
- Minggu III (M3): Deflasi berlanjut dengan IPH sebesar -0,17, dipengaruhi oleh komoditas Bawang Merah (-0,4734), Daging Ayam Ras (-0,2598), dan Cabai Merah (-0,1544).
- Minggu IV (M4): Tidak dilakukan perhitungan IPH

Indeks Perkembangan Harga (IPH) di Kota Banjarbaru pada September 2026 dibuka dengan inflasi sebesar 0,46 pada minggu pertama yang dipicu oleh kenaikan harga Daging Sapi (andil 0,7968), Daging Ayam Ras, dan Cabai Merah. Namun, kondisi tersebut segera berbalik arah pada minggu kedua dan ketiga menjadi deflasi masing-masing sebesar -0,19 dan -0,17 seiring meredanya tekanan harga serta meningkatnya pasokan Bawang Merah, Cabai Merah, Bawang Putih, dan Daging Ayam Ras. Secara keseluruhan, kemampuan daerah dalam meredam tekanan inflasi awal bulan menunjukkan efektivitas stabilitas pasokan, namun mitigasi risiko tetap harus diperkuat TPID untuk mengantisipasi gejolak harga komoditas peternakan dan hortikultura ke depan.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Kendala yang masih dihadapi oleh TPID Kota Banjarbaru Pada TRIWULAN III Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. **Dampak Kabut Asap dan Ancaman Karhutla terhadap Sektor Pertanian dan Logistik:** Masifnya kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta pekatnya kabut asap di wilayah Kota Banjarbaru dan sekitarnya selama periode Juli hingga September 2026 telah mengganggu jarak pandang serta aktivitas transportasi darat. Kondisi ini berpotensi menghambat kelancaran arus distribusi/rantai pasok komoditas pangan pokok dari sentra-sentra produksi menuju pasar eceran di Kota Banjarbaru, sekaligus mengancam produktivitas lahan pertanian hortikultura lokal.
2. **Tekanan Volatilitas Harga Kelompok Pangan Bergejolak (*Volatile Food*):** Terjadinya fluktuasi harga yang cukup tajam pada sejumlah komoditas strategis, terutama komoditas hortikultura (seperti Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Merah, dan Cabai Rawit) serta komoditas peternakan (Daging Ayam Ras, Telur Ayam Ras, hingga Daging Sapi) yang mengalami pergerakan harga naik-turun secara dinamis antar minggu sepanjang Juli hingga September 2026.
3. **Risiko Gangguan Cuaca Ekstrem dan Musim Kemarau:** Berkepanjangannya musim kemarau di paruh kedua tahun 2026 yang memicu kekeringan di beberapa wilayah sentra produksi, berpotensi mengganggu hasil panen komoditas pangan utama (terutama padi/beras dan produk hortikultura) serta memicu kenaikan harga pakan ternak yang berdampak langsung pada biaya produksi peternakan.
4. **Panjangnya Rantai Pasok Pangan Terdistribusi:** Masih panjangnya alur distribusi pangan dari produsen luar daerah maupun sentra lokal hingga ke pedagang eceran di pasar Kota Banjarbaru, yang meningkatkan kerentanan terhadap pembengkakan biaya logistik serta hambatan distribusi apabila terjadi gangguan cuaca atau hambatan jalur

transportasi darat.

5. **Ketergantungan Pasokan Daerah Luar dan Optimalisasi Lembaga Pangan:** Belum optimalnya penguatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) secara masif untuk memetakan wilayah surplus komoditas, serta perlunya penguatan peran BUMD pangan sebagai *offtaker* hasil pertanian lokal guna mengamankan cadangan pangan mandiri jangka pendek saat terjadi gejolak pasokan.
6. **Perlunya Penguatan Infrastruktur Data dan Kapasitas Menuju 2028:** Kebutuhan krusial untuk terus meningkatkan kualitas pemantauan, validasi outlet komoditas, integrasi data, serta peningkatan kapasitas SDM terkait statistik harga sebagai langkah akselerasi persiapan Kota Banjarbaru menjadi Kota Penghitung Inflasi mandiri pada tahun 2028
7. **Kebutuhan Optimalisasi Sistem Peringatan Dini Komunikasi Publik:** Masih perlunya penguatan sistem komunikasi publik berbasis *Early Warning System* (EWS) untuk mengelola ekspektasi masyarakat secara cepat dan tepat guna mencegah terjadinya kepanikan belanja (*panic buying*) di tengah dinamika fluktuasi harga dan isu lingkungan seperti kabut asap

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pelaksanaan kebijakan pengendalian Inflasi daerah di Kota Banjarbaru pada TRIWULAN III tahun 2026 ini, TPID Kota Banjarbaru terus menjaga kestabilan IPH dengan strategi 4K, yaitu:

- **Keterjangkauan harga:**

TPID Kota Banjarbaru secara aktif menjaga keterjangkauan daya beli masyarakat di tengah dinamika fluktuasi harga komoditas pangan. Langkah konkret yang dilakukan meliputi pelaksanaan rapat koordinasi TPID khusus membahas evaluasi IPH yang telah dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 2026. Selain itu, sebagai persiapan dalam meredam gejolak harga pangan ke depan, telah dilaksanakan rapat persiapan pelaksanaan pasar murah pada tanggal 29 September 2026, di mana realisasi kegiatan pasar murahnya dijadwalkan berlangsung pada bulan Oktober 2026. Pemantauan harga juga diintensifkan secara rutin melalui pelaksanaan monitoring pasar sebanyak dua kali setiap bulannya baik di pasar tradisional maupun ritel modern.

- **Ketersediaan Pasokan**

Upaya menjaga ketersediaan pasokan dilakukan melalui monitoring rutin stok komoditas di tingkat distributor guna memastikan ketahanan pangan aman. Menghadapi risiko musim kemarau dan ancaman kabut asap/karhutla yang berpotensi mengganggu produktivitas pertanian lokal di Triwulan III, TPID memperkuat koordinasi untuk memastikan ketersediaan cadangan pangan serta kelancaran pasokan komoditas pangan pokok (seperti beras, bawang, dan cabai) agar tidak terjadi kelangkaan di pasaran.

- **Kelancaran Distribusi**

Kelancaran distribusi dipastikan melalui sidak pasar secara terjadwal bersama instansi terkait

untuk menjamin aliran barang pokok dari produsen/distributor berjalan lancar tanpa indikasi penimbunan. Selain itu, optimalisasi program inovasi intervensi distribusi pangan serta penguatan komitmen Kerja Sama Antar Daerah (KAD) terus didorong guna memfasilitasi kelancaran pasokan dari daerah surplus logistik ke wilayah Kota Banjarbaru, terutama di tengah tantangan hambatan jalur transportasi akibat cuaca atau kabut asap.

- **Komunikasi Efektif**

Strategi komunikasi efektif diimplementasikan melalui keikutsertaan secara rutin dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi bersama Kemendagri yang dilaksanakan setiap minggunya. Sebagai bentuk tindak lanjut langsung dari rakor mingguan tersebut, TPID Kota Banjarbaru secara berkala menyelenggarakan rakor internal menindaklanjuti arahan Sekjen Kemendagri terkait langkah konkret pengendalian inflasi di daerah yang pelaporannya dikoordinasikan melalui Inspektorat setiap harinya. Langkah komunikasi publik ini juga diperkuat untuk mengelola ekspektasi masyarakat agar tetap tenang dan mencegah terjadinya kepanikan belanja (*panic buying*) di tengah dinamika harga.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

- Kebijakan pengendalian inflasi di Kota Banjarbaru pada **TRIWULAN III** Tahun 2026 secara umum berjalan dengan baik dan adaptif dalam menjaga kestabilan Indeks Perkembangan Harga (IPH). Pelaksanaan strategi 4K telah diimplementasikan melalui langkah-langkah konkret, seperti penyelenggaraan Rakor TPID pada 3 Juli 2026, pelaksanaan monitoring pasar rutin sebanyak 2 kali setiap bulan, serta keikutsertaan secara konsisten dalam Rakor Inflasi mingguan Kemendagri. Komitmen ini ditindaklanjuti dengan pelaporan harian langkah konkret melalui Inspektorat serta persiapan matang kegiatan Pasar Murah pada akhir September untuk pelaksanaan di bulan Oktober 2026. Langkah-langkah intervensi dan pemantauan ini terbukti efektif dalam meredam tekanan inflasi yang sempat terjadi pada awal Juli (0,19 di M4) dan awal September (0,46 di M1), hingga mampu mengarahkan IPH kembali ke zona deflasi yang stabil.
- Namun, evaluasi menunjukkan adanya tantangan eksternal dan lingkungan yang cukup berat pada triwulan ini, yaitu meluasnya musibah Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) serta pekatnya ancaman kabut asap di wilayah Kota Banjarbaru dan sekitarnya. Kondisi kemarau panjang dan kabut asap ini tidak hanya berpotensi menurunkan produktivitas komoditas hortikultura lokal, tetapi juga menjadi hambatan serius bagi kelancaran arus transportasi logistik dan distribusi pangan dari luar daerah. Di sisi lain, meskipun tren deflasi yang mendominasi (seperti pada Agustus yang menyentuh -0,78 di M1 serta deflasi Bawang Merah dan Telur Ayam Ras) membantu menjaga keterjangkauan daya beli masyarakat, fluktuasi harga yang tajam tetap memerlukan perhatian agar keberlangsungan usaha petani dan peternak lokal tetap terlindungi.
- Secara keseluruhan, integrasi pemantauan IPH mingguan serta koordinasi terpadu telah mendukung pengambilan kebijakan yang terukur bagi TPID Kota Banjarbaru. Langkah ke depan, dalam rangka penguatan persiapan Kota Banjarbaru sebagai Kota Penghitung Inflasi Tahun 2028 melalui fasilitasi Survei Biaya Hidup (SBH) 2027, efektivitas kebijakan pengendalian inflasi akan sangat bergantung pada mitigasi dampak bencana

asap/cuaca ekstrem terhadap jalur logistik, penguatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD), optimalisasi peran BUMD pangan, serta penyampaian komunikasi publik berbasis *Early Warning System* (EWS) untuk menjaga ekspektasi masyarakat tetap kondusif.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. **Penguatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dan Efisiensi Rantai Pasok:** Memperkuat dan memperluas kesepakatan KAD secara formal dengan pemerintah daerah surplus guna menjamin kesinambungan pasokan pangan strategis (khususnya bawang merah, bawang putih, cabai merah, dan daging sapi) serta memangkas rantai pasok pangan yang terlalu panjang agar tidak rentan terhadap hambatan distribusi.
2. **Optimalisasi Intervensi Pasar dan Pelaksanaan Pasar Murah:** Mengoptimalkan pelaksanaan Operasi Pasar Murah (seperti yang dijadwalkan pada bulan Oktober 2026), Gerakan Pangan Murah (GPM), SPHP, dan program inovasi distribusi (seperti program *Jukung Pangan*) guna meredam potensi lonjakan harga serta menjaga keterjangkauan daya beli masyarakat menghadapi akhir tahun.
3. **Mitigasi Dampak Karhutla, Kabut Asap, dan Kemarau Panjang:** Memperkuat langkah antisipatif dan mitigasi risiko dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kabut asap yang berpotensi mengganggu jalur transportasi/logistik distribusi pangan darat dan merusak produktivitas lahan pertanian hortikultura lokal, didukung oleh penguatan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di BULOG.
4. **Monitoring dan Early Warning System (EWS) Komunikasi Publik:** Memperkuat sistem peringatan dini berbasis pemantauan harga harian komoditas bergejolak (*volatile food*) serta mengefektifkan komunikasi publik secara transparan untuk mengelola ekspektasi pasar dan mencegah terjadinya *panic buying* di tengah isu cuaca ekstrem maupun gejolak harga.
5. **Dukungan Kesiapan Menuju Kota Penghitung Inflasi 2028:** Meningkatkan kualitas pelaporan data IPH harian/mingguan serta mendukung penuh persiapan pelaksanaan Survei Biaya Hidup (SBH) 2027 oleh BPS melalui fasilitasi data, validasi outlet/komoditas, dan peningkatan kapasitas SDM statistik harga di daerah.
6. **Akselerasi Digitalisasi Tata Kelola Keuangan (ETPD):** Mempercepat implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) melalui pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD/KKI) dan penerapan SP2D Online di seluruh SKPD untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi anggaran pengendalian inflasi.
7. **Penguatan Kelembagaan Pangan dan Perlindungan Peternak/Petani Lokal:** Mendorong peran BUMD pangan sebagai *offtaker* hasil pertanian lokal, menjalankan program aksi *Roadmap* TPID 2025–2027, serta memitigasi dampak kenaikan harga pakan ternak dan fluktuasi harga ekstrem guna menjaga stabilitas produksi daging ayam ras, telur ayam ras, dan hortikultura lokal secara berkelanjutan